

MEDIA BARU, BUDAYA POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
(Survei Pemilih di Jambi, Babel dan Jakarta Mengenai Aktifitas Komunikasi Politik
Melalui Media Baru)

NEW MEDIA, POLITICAL CULTURE, AND POLITICAL PARTICIPATION
(Survey to the voters in province of Jambi, Babel, and Jakarta on political communication
in new media)

Bambang Mudjiyanto

Peneliti BPPKI Jakarta, Jl. Pegangsaan Timur No, 19 B Jakarta Pusat
(Naskah diterima Oktober 2014, diperiksa mitra bestari Nopember 2014, direvisi Nopember 2014,
disetujui terbit Desember 2014)

ABSTRACT

This research tries to answer problems regarding phenomenon of political culture, and political participation of the peoples by using new media (population based on data in regional commission for general election). By survey, this research shows that there is variety of political culture in the three of research location. But, the over all inclination, the political culture is participant. Other finding is that there is variety of political participation as well. It shows that there is difference of political participation typology, specially apathetic one. The respondent proportion is different to each other but dominant, specially in Pangkal Pinang. Phenomenon of the same political typology in the three research locations is spectator one. Respondents in this typology become second dominant respondents in every location. Statistically, the relationship of those two variables is not significant. Relationship notations as follow: in Jakarta, $X^2 = 1,1857$, $df\ 3$, $p > \alpha\ 0,05$ (7,815). In Pangkal Pinang, $X^2 = 5,330$, $df\ 6$, $p > \alpha\ 0,05$ (12,592), in Jambi $X^2 = 2,0063$, $df\ 4$, $p > \alpha\ 0,05$ (9,488).

Keywords : New Media; Political Culture; Participation Culture.

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menjawab persoalan menyangkut fenomena budaya politik dan partisipasi politik terkait penggunaan media baru oleh masyarakat (para anggota masyarakat yang secara sampling terpilih dari populasi pemilih menurut data KPUD). Dengan metode survai, penelitian ini menemukan bahwa memang terdapat keragaman budaya politik di tiga lokasi penelitian namun dengan satu kecenderungan di mana responden umumnya secara *over all* sudah memiliki budaya politik *partisipan*. Temuan lain yaitu bahwa fenomena partisipasi politik itu memang bervariasi adanya. Secara *over all* memperlihatkan bahwa di lokasi itu cenderung adanya perbedaan tipologi terkait dengan gejala partisipasi dimaksud. Perbedaan itu terutama menyangkut responden yang bertipologi *apatis*. Proporsi responden yang demikian berbeda jumlahnya di setiap lokasi, namun jadi bagian responden yang menonjol. Paling banyak dijumpai di Pangkal Pinang. Sedang tipologi politik lain yang cenderung sama gejalanya di tiga lokasi penelitian, yaitu tipologi Spektator. Responden bertipologi ini menjadi kelompok responden terbesar kedua di setiap lokasi penelitian. Secara statistik hubungan kedua variabel tidak signifikan. Notasi hubungan tersebut yaitu : Di Jakarta, $X^2 = 1,1857$, $df\ 3$, $p > \alpha\ 0,05$ (7,815). Di Pangkal Pinang, $X^2 = 5,330$, $df\ 6$, $p > \alpha\ 0,05$ (12,592). Di Jambi $X^2 = 2,0063$, $df\ 4$, $p > \alpha\ 0,05$ (9,488).

Kata-kata kunci : Media Baru; Budaya Politik; Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan

Media baru merupakan istilah bagi media yang memuat karakteristik media lama secara konvergen. Contoh media lama adalah Koran, TV dan radio. Masing-masing media memiliki medium tersendiri. Koran menggunakan medium kertas, TV mediumnya gelombang elektronik, sedangkan radio menggunakan medium gelombang radio untuk mentransmisikan informasinya. Melalui media baru, ketiga media tersebut dapat terangkum dan menggunakan satu medium, dalam hal ini melalui jaringan internet.

Media baru tersebut akhirnya dapat secara sekaligus memberikan informasi tertulis seperti dalam koran, bergerak seperti kabar di televisi, serta proses informasi yang dimiliki dengan cepat dapat tersampaikan kepada para penggunanya. Hal itulah yang membuat media baru berjangkauan internet akhirnya banyak dipilih oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas mencari informasi, serta untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas jangkauan komunikasi yang mereka lakukan.

Terkait dengan aktifitas sebelumnya, maka dari prasarana berkomunikasi yang tersedia dalam media baru itu, berdasarkan fenomena yang tampak, misalnya saja dari salah satu situs jejaring sosial tertentu, mengindikasikan bahwa konten yang mereka terakan dalam media baru itu sangat bervariasi sifatnya. Diantaranya ada yang sangat fokus pada soal-soal pribadi, fokus pada soal-soal politik, fokus pada soal-soal barang dagangan, baik jasa maupun barang (BPPKI Jakarta, 2014). Ada juga yang fokus pada soal-soal hukum, soal-soal-soal peluang kerja dan bahkan soal kehidupan seks. Variasi konten terkait aktifitas dimaksud, itu membuktikan bahwa individu pengguna media baru masing-masing memiliki pilihannya sendiri menyangkut konten komunikasi.

Salah satu di antara beragam konten yang tampak cukup banyak juga menjadi pilihan para pengguna media baru tadi dalam aktifitas mereka berkomunikasi melalui media baru, yaitu menyangkut konten masalah politik. Terkait dengan masalah politik dalam hubungannya dengan media baru tersebut, sejumlah penelitian tampaknya memang sudah pernah dilakukan sejumlah pihak. Diantaranya yaitu Kaye dan Johnson (2002), menemukan bahwa ada empat motif utama pengguna media baru dalam mencari informasi politik di internet. Hasan A. Ayed (2005) yang meneliti efek internet pada budaya politik, menemukan bahwa internet memiliki efek untuk membentuk budaya politik pada mahasiswa. Lalu, Mossberger (2008) yang meneliti internet sebagai pendorong partisipasi politik, menyimpulkan bahwa internet itu mendorong partisipasi politik dalam tiga cara. Sementara Karim Suryadi dan Meita P Agustin (2010) yang meneliti pemanfaatan internet dan pembinaan karakter, menyimpulkan bahwa pemanfaat internet itu berkontribusi terhadap karakter siswa.

Menyimak sejumlah studi masalah politik dalam hubungannya dengan media baru sebelumnya, kiranya itu menunjukkan bukti ketertarikan peneliti terhadap fenomena dimaksud. Dari ketertarikan itu tampak, kajian mereka itu baru sebatas melihat fenomena variabel pencarian informasi; budaya politik; partisipasi politik dan karakter. Khusus menyangkut variabel budaya politik (Hasan A. Ayed) dan partisipasi politik (Mossberger), terlihat dari penelitian mereka itu, posisinya ditempatkan sebagai variabel dependen. Penelitian ini sendiri berupaya menempatkan variabel budaya politik dan partisipasi politik tadi sebagai variabel bebas dalam kaitan aktifitas mereka melakukan komunikasi politik melalui media baru. Dengan penempatan yang demikian, kiranya penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang demikian kiranya menjadi penting dilakukan, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Sejalan dengan pemfokusan persoalan sebelumnya, masalah penelitian ini dirumuskan menjadi : Bagaimana hubungan budaya politik dengan partisipasi politik masyarakat melalui media baru ? Untuk kepentingan penelitian, pertanyaan ini dirinci menjadi : 1) Bagaimanakah kategori budaya politik masyarakat pengguna media baru ?; 2) Bagaimanakah kategori bentuk partisipasi politik masyarakat pengguna media baru ? 3) Seberapa kuat signifikansi hubungan antara budaya politik Masyarakat Pemilih dengan tipologi partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktifitas pemanfaatan media baru ? Dengan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi budaya politik dan partisipasi politik masyarakat pengguna media baru. Selain itu juga untuk mengetahui signifikansi hubungan di antara kedua variabel. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para praktisi politik dibidang kebijakan komunikasi politik melalui media baru. Secara akademis diharapkan dapat melengkapi literatur-literatur sejenis yang telah ada sebelumnya.

Kerangka Teori

1. Tinjauan Literatur

Penelitian menyangkut media baru dalam hubungannya dengan penggunaan khalayak, terutama terkait dengan fenomena politik, diketahui sudah relatif sering dilakukan di dunia. Berdasarkan sejumlah literatur yang ditemui, diketahui bahwa dalam hubungannya dengan fenomena politik tadi, maka fenomena itu ada yang khusus terfokus pada fenomena menyangkut partisipasi politik dan ada yang tidak terfokus pada fenomena partisipasi.

Dalam kaitan studi yang tidak terfokus pada fenomena partisipasi politik, maka tersebutlah diantaranya seperti yang dilakukan oleh Kaye dan Johnson (2002). Kedua peneliti ini, dalam studinya hanya berupaya mempelajari fenomena akses informasi politik melalui internet serta motivasi-motivasi yang melatarbelakangi aktifitas akses internet itu. Hasilnya sendiri menunjukkan bahwa dalam pencarian informasi melalui internet itu, responden ternyata didorong oleh empat motivasi utama. Penelitian lainnya yang tergolong kategori ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karim Suryadi dan Meita P Agustin -2010/Cimahi Indonesia. Kedua peneliti ini dalam kaitan mempelajari internet dan fenomena politik, membatasinya pada persoalan hubungan pemanfaatan internet dan pembinaan karakter responden. Dengan melalui survey, keduanya menemukan bahwa pemanfaatan internet berkontribusi terhadap karakter siswa yang mereka teliti.

Selanjutnya, terkait dengan studi internet yang khusus terfokus pada fenomena menyangkut partisipasi politik, diketahui ada beberapa studi yang telah dilakukan peneliti. Diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Ayed (2005) Melalui penelitiannya yang berjudul *The Influence of Internet in Political Culture (A Field Study)*. Peneliti ini memfokuskan kajian pada persoalan pengaruh internet terhadap budaya politik. Temuannya sendiri menunjukkan bahwa internet itu memiliki efek untuk membentuk budaya politik pada mahasiswa yang ia teliti. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mossberger pada tahun 2008. Peneliti ini mencoba mempelajari bagaimana internet itu berfungsi sebagai pendorong bagi orang untuk melakukan partisipasi politik, dan berdasarkan hasil penelitiannya ia menemukan bahwa internet itu bisa mendorong responden untuk melakukan partisipasi politik melalui tiga cara, yaitu dengan menawarkan informasi untuk membantu membuat keputusan dan mempromosikan diskusi, dengan menyediakan outlet seperti *chat room* yang memungkinkan individu untuk bertemu dan membahas politik, dan dengan menyediakan kelompok kepentingan, calon, dan partai untuk revitalisasi upaya mobilisasi era sebelumnya melalui e-mail.

Selanjutnya, penelitian internet dalam kaitan partisipasi politik juga dilakukan oleh dua peneliti dari Belgia, yaitu Ellen Quintelier dan Sara Vissers pada tahun 2008. Penelitian mereka ini berupaya mempelajari dampak penggunaan internet terhadap partisipasi politik kaum muda di Belgia. Hasil studi mereka ini memperlihatkan bahwa kegiatan online yang dilakukan di internet mempengaruhi partisipasi politik, sementara lama meng-akses internet diketahui tidak mempengaruhi bagaimana partisipasi politik responden. Terakhir, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sang-Hee Kweon, dan Wi-Geun Kim tahun 2010 di Korea. Kedua peneliti ini memfokuskan kajiannya pada fenomena penyebab orang-orang dalam melakukan aktifitas partisipasi politik melalui internet. Hasil studi mereka sendiri menunjukkan bahwa memang ada hubungan di antara variabel-variabel O1 (orientasi 1) dari pengguna internet variabel-variabel R (*response*).

2. Konsep-Konsep Teoritik

a. Media Baru dan Pemanfaatannya

Media baru merupakan istilah bagi media yang memuat karakteristik media lama secara konvergen. Contoh media lama adalah Koran, TV dan radio. Masing-masing media memiliki medium tersendiri. Koran menggunakan medium kertas, TV mediumnya gelombang elektronik, sedangkan radio menggunakan medium gelombang radio untuk mentransmisikan informasinya. Melalui media baru, ketiga media tersebut dapat terangkum dan menggunakan satu medium, dalam hal ini melalui jaringan internet.

Media baru tersebut akhirnya dapat secara sekaligus memberikan informasi tertulis seperti dalam koran, bergerak seperti kabar di televisi, serta proses informasi yang dimiliki dengan cepat dapat tersampaikan kepada para penggunanya. Hal itulah yang membuat media baru berjaringan internet akhirnya banyak dipilih oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas mencari informasi, serta untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas jangkauan komunikasi yang mereka lakukan.

Internet dalam konteks media baru, memiliki definisi yang meliputi : 1) Jaringan infrastruktur teknologi yang saling terhubung untuk mendukung World Wide Web; 2) Situs-situs resmi yang terhubung dalam web; 3) Arsitektur dan software baik yang bersumber terbuka maupun yang tertutup, seperti Firefox, Wikipedia, Internet Explorer, Google; 4) Komputer dan bahasa sehari-hari yang membuat internet dapat diakses oleh orang dari berbagai budaya dan literasi; 5) Email, chat, instant messaging (AOL, MSN); 6) Blog dan situs jejaring sosial; 7) Games, Komunitas, Lingkungan dan Dunia; 8) Berbagai cara komunikasi yang dimediasi secara digital yang telah meluas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari definisi itu dapat diketahui bahwa begitu banyak hal yang dapat dilakukan melalui media baru. Hal ini dimungkinkan karena seperti dikatakan Feldman dalam Flew media baru itu memiliki karakteristik : 1) *manipulable* (mudah diubah dan beradaptasi dalam setiap tahap pembuatan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan), 2) *networkable* (mudah dibagi dan dipertukarkan antara banyak pengguna secara bersamaan dan melewati jarak yang jauh sekaligus), 3) *dense* (jumlah informasi digital yang besar dapat disimpan dalam ruang fisik kecil), 4) *compressible* (kapasitas informasi dapat diringkas sesuai kebutuhan), dan 5) *impartial* (informasi digital mudah disebarkan jaringan tanpa peduli dalam bentuk apa informasi tersebut diwakilkan, siapa yang memiliki atau membuat informasi tersebut, atau untuk apa informasi tersebut akan digunakan. Karenanya, dengan melalui media baru masyarakat dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia melalui berbagai situs yang terhubung dalam web. Selain itu masyarakat bisa saling berbagi informasi serta saling berkomunikasi melalui berbagai fasilitas yang terdapat di blog, email, instant messaging, serta situs jejaring sosial.

Fenomena penggunaan media baru dalam kaitan aktifitas politik sendiri, dalam realitasnya baik di dunia maupun di Indonesia, sudah banyak dijumpai. Untuk Indonesia misalnya, salah satu diantaranya adalah menyangkut apa yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Bengkulu bernama Usman Yasin, yang menggagas gerakan 1.000.000 facebookers mendukung Bibit-Chandra, saat kedua petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tersangkut dugaan penerimaan suap. Bahkan, pada tahun 2008-2009 tim sukses partai politik serta capres (calon presiden) di Indonesia lebih serius menggunakan media internet sebagai alat kampanye. Ditandai dengan kemunculan berbagai Blog/ Website Capres dan calon anggota legislatif (caleg), yang memperdagangkan program, visi, misinya untuk meraih dukungan masyarakat Indonesia. Di sini Portal Jejaring Sosial (Facebook, Youtube, Friendster, dan lain-lain) juga banyak digunakan, sebagai sarana membangun komunikasi dengan konstituen. Sementara menyangkut fenomena di dunia lain, misalnya seperti yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye di USA. Terkait dengan ini, pelaksanaan kampanye Barack Obama menggunakan web 2.0, seperti YouTube, MySpace dan terutama Facebook untuk menarik donasi dari pendukungnya. Dari media tersebut, Obama mendapatkan dana kampanye sebesar 454 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan menghabiskan 377 juta dollar AS, di mana merupakan angka tertinggi dalam sejarah Amerika dan dunia. Dari jumlah fantastis tersebut, sebanyak 95 persen dana berasal dari situs jejaring sosial. Dalam hubungan ini, termasuk pula dengan yang terjadi di Lebanon, di mana blog dan grup daring (*online*) telah benar-benar menjadi alat politik di tangan masyarakat sipil untuk menggalakkan gerakan-gerakan daring. Para aktivis dunia maya berharap dapat memacu perubahan di Lebanon dengan menguatkan partisipasi warga dalam keputusan-keputusan politik. Salah satu gerakannya, para aktivis dunia maya ini meyakinkan Menteri Kebudayaan Lebanon, Salim Warde, untuk mengepalai sebuah prakarsa baru untuk meminta parlemen menyusun draft undang-undang yang, bila disetujui, akan melindungi bangunan-bangunan yang sangat tua dan paling terancam di Lebanon.

b. Budaya Politik

Menilik tentang partisipasi politik masyarakat, hal ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang/pendekatan, seperti partisipasi politik sebagai bentuk budaya politik atau partisipasi politik sebagai bagian dari bentuk komunikasi politik. Berkaitan dengan sudut pandang yang pertama, yaitu partisipasi politik sebagai suatu bentuk budaya, teori yang dikemukakan oleh Almond membagi tipe-tipe kebudayaan politik menjadi tiga tipe, yaitu parokial, subyek, dan partisipan.

Tabel 1
Tipe-tipe Kebudayaan Politik

Tipe Budaya Politik	Sistem sebagai obyek umum	Obyek-obyek input	Obyek-obyek output	Pribadi sebagai partisipan aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Penggolongan ketiga tipe tersebut didasarkan atas empat faktor pengamatan atas obyek politik khusus, yaitu sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif. Sistem sebagai obyek secara umum berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat 'konstitusionalnya' dan lain-lain, serta perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini dan pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu. Obyek-obyek input berkaitan tentang bagaimanapun pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat 'upward', bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang segala struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan.

Obyek-obyek output berkaitan dengan bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan yang 'downward', struktur-struktur, individu-individu keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses, dan bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu. Sementara pribadi sebagai partisipan aktif berkaitan dengan bagaimana perasaan pribadi seseorang sebagai anggota sistem politik; bagaimana pemahamannya tentang haknya, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh, bagaimana penilaiannya terhadap kemampuannya, norma-norma partisipasi atau penampilan apa yang diketahui dan dipergunakannya dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapat.

Dari faktor-faktor itu didapat penggolongan masyarakat berdasar budaya politiknya. Tergolong kebudayaan politik parokial jika frekuensi orientasi terhadap keempat jenis obyek politik khusus seperti yang digambarkan dalam Tabel 2.2 mendekati nol. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Sementara kebudayaan politik subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut, mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya; dan mereka menilainya sebagai absah atau sebaliknya. Tapi hubungannya terhadap sistem secara umum, dan terhadap output, administratif, atau 'downward flow'-nya sistem politik itu secara esensial adalah merupakan hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subyek. Sedangkan kebudayaan politik partisipan merupakan suatu bentuk kultur di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif; dengan kata lain, terhadap aspek input dan output dari sistem politik itu. Anggota-anggota pemerintahan yang partisipatif dapat secara menyenangkan atau sebaliknya diarahkan kepada berbagai obyek politik yang serba ragam. Mereka cenderung diarahkan kepada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, sekalipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peranan yang demikian bisa saja bersifat menerima ataupun menolaknya seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah (Rahman). Dari pengertian partisipasi politik tersebut, ada beberapa kriteria yang dikemukakan untuk menyebut suatu kegiatan sebagai bentuk partisipasi politik : (1) Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.; (2) Kegiatan politik warga negara biasa atau orang-perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).; (3) Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan, juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.; (4) Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul, gagal atau berhasil; (5) Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*).

Kurang lebih sama dengan pendapat Rahman sebelumnya, dengan mengacu pada pendapat Budiardjo (2003), Huntington dan Nelson (2001), Suhemi berpendapat bahwa pengertian partisipasi politik mencakup: (a) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) dilakukan oleh warganegara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, (d) semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak, dan berhasil atau gagal, (e) dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara. Sementara, menyangkut kategori-kategori bentuk partisipasi politik itu sendiri, dengan mengacu pada Milbrarth dan Goel (1997) Suhemi membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) spektator, artinya orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) pengkritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional.

Batasan dan Operasionalisasi Konsep

- Batasan Konsep

- 1) **Media Baru adalah internet**, yakni berupa medium komputer yang jumlahnya mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang secara teknis ICT saling berketersambungan melalui jaringan kabel telepon, kabel dan satelit.
- 2) **Pemanfaatan adalah** pemanfaatan media baru/internet oleh anggota masyarakat pemilih berupa aktifitas komunikasi/informasi melalui sarana yang ada dalam internet berupa *chatting room* (obrolan); e-mail; blog; status dalam situs jejaring sosial; forum-forum diskusi dalam internet; dan *web site*).
- 3) **Budaya Politik** adalah kualitas anggota masyarakat dari segi kehidupan politik yang dilihat dari segi pengetahuan/pemahamannya mengenai istem sebagai obyek secara umum; Obyek-obyek input; Obyek-obyek output; dan pribadinya sebagai partisipan aktif.
- 4) **Partisipasi Politik adalah** kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik melalui media baru (yang dilakukan seperti melalui *chatting room* (obrolan); e-mail; blog; status dalam situs jejaring sosial; forum-forum diskusi dalam internet; dan *web site*) yang diorientasikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah pusat maupun daerah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, militer dan agama.

- Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Level Pengukuran	Varian Nilai
1. Budaya Politik	Jawaban Responden terkait dengan pertanyaan menyangkut sistem : 1) sebagai obyek secara umum 2) Obyek-obyek input 3) Obyek-obyek output 4) pribadi sebagai partisipan aktif	Nominal	<i>Tipologi Budaya Politik Responden :</i> a) <i>parokial</i> ; jika responden memiliki skor sebesar 0,00-2,26 atas jawabannya mengenai pertanyaan budaya politik b) <i>subyek</i> ; jika responden memiliki skor sebesar 2,67-5,32 atas jawabannya mengenai pertanyaan budaya politik c) <i>partisipasi</i> , jika responden memiliki skor sebesar 5,33-8,00 atas jawabannya mengenai pertanyaan budaya politik.
2. Partisipasi Politik dalam aktifitas pemanfaatan media baru	Jawaban Responden terkait dengan pertanyaan menyangkut kegiatannya dalam kehidupan politik melalui media baru (yang dilakukan melalui akses <i>web page</i> seperti melalui <i>chatting room</i> (obrolan); e-mail; blog; status dalam situs jejaring sosial; forum-forum diskusi dalam internet; dan <i>web site</i>) yang diorientasikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah pusat maupun daerah di bidang : - <i>politik</i> , - <i>ekonomi</i> , - <i>sosial</i> , - <i>budaya</i> , - <i>militer</i> dan - <i>agama</i> .	Nominal	<i>Tipologi Partisipasi Politik Responden :</i> (a) <i>apatis</i> , jika responden memiliki skor sebesar 0,00-45,00 atas jawabannya mengenai pertanyaan <i>Partisipasi Politik</i> (b) <i>spektator</i> , jika responden memiliki skor sebesar 46,00-90,00 atas jawabannya mengenai pertanyaan <i>Partisipasi Politik</i> (c) <i>gladiator</i> , jika responden memiliki skor sebesar 91,00-135,00 atas jawabannya mengenai pertanyaan <i>Partisipasi Politik</i> (d) <i>pengkritik</i> , jika responden memiliki skor sebesar 136,00-180,00 atas jawabannya mengenai pertanyaan <i>Partisipasi Politik</i>

Methodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan paradigma positivistik melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Tipe penelitiannya berupa penelitian deskriptif, yakni berupa penggambaran fenomena menyangkut dua variabel bebas (variabel Budaya Politik dan partisipasi politik). Obyek Penelitiannya adalah anggota masyarakat pemilih di wilayah perkotaan.

Sampling area penelitian ini adalah ibukota provinsi dari tiga provinsi, yaitu Jambi dan Pangkal Pinang dan Jakarta. Populasi penelitian ini adalah para anggota masyarakat pemilih yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). **Populasi sasarannya** yaitu para

anggota masyarakat pemilih yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan Dapil (sub Dapil) yang terambil secara *multi stage simple random sampling*. **Sampling responden** dilakukan dengan teknik acak sederhana dengan cara mengundi nomor-nomor urut anggota masyarakat pemilih yang ada dalam daftar KPUD. **Jumlah responden** untuk masing-masing area sampel sebanyak 100 responden.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur (instrument). Pengaplikasian instrument tersebut dilakukan setelah melakukan pretest instrument yang nilai reliabilitas statistik *Cronbach's Alpha-nya sebesar minimal 0,85*. Data primer yang diperoleh diolah dengan menggunakan komputer melalui Program *SPSS for Windows*. Analisis dan penyajian data dilakukan dengan tiga cara. Pertama dilakukan dengan analisis deskriptif masing-masing variabel minor dalam setiap variabel mayor (Budaya Politik; dan Partisipasi Politik). Kedua, dilakukan secara deskriptif dengan teknik analisis *over all* dari setiap variabel mayor. Ketiga, dilakukan dengan meng-elaborasi hubungan antara variabel budaya politik dengan variabel partisipasi politik.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini cenderung lebih banyak berasal dari kaum laki-laki di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Pangkal Pinang. Proporsinya mencapai 60-70- %. Sementara di Jambi proporsi kaum perempuan itu sedikit lebih banyak dari pada laki-laki, yaitu 53 %.

Dari segi usia, maka di Jakarta dan Pangkal Pinang, mereka bagian terbesar merupakan kelompok usia Millennial (Tahun lahir >1982). Di Pangkal Pinang, proporsinya mencapai 73 % dan di Jakarta sebanyak 53 %. Di Jambi, kelompok Xers (Tahun lahir 1965-1982) yang lebih banyak, yaitu sebanyak 47.0%. Jadi, responden penelitian ini dari segi usia tampaknya cenderung terdiri dari individu-individu yang relatif akrab dengan TIK.

Di ketiga lokasi penelitian, responden yang umumnya beragama Islam itu, dari segi pendidikan yang ditamatkan, tampak mereka ini umumnya cenderung tamat dari pendidikan SLTA. Proporsinya berkisar 57%–79 %. Ada juga memang yang berpendidikan di luar dari SLTA tadi, yaitu SLTP, diploma, sarjana dan pasca sarjana. Namun proporsinya relatif tidak banyak, yaitu berkisar 1 %-29.0%. Mereka ini juga diketahui lebih banyak yang bekerja di sektor swasta. Di Jakarta porsinya sebanyak 65.0%; Pangkal Pinang 45.0 % dan Jambi sebanyak 30 %. Jenis pekerjaan lain yang dapat dikatakan jumlahnya cukup banyak yaitu PNS (21.0%), pelajar/mahasiswa (22.0%) dan wira usaha (16.0 %).

Selanjutnya, terkait dengan saluran-saluran komunikasi produk TIK, diketahui juga bahwa kalangan responden sudah memiliki sejumlah produk TIK itu. Dari tujuh saluran komunikasi produk TIK itu, ternyata semuanya diakui sudah mereka miliki. Namun demikian, *handphone* tampak menjadi saluran komunikasi yang umum dimiliki oleh responden di tiga lokasi. Proporsinya hampir mencapai 100 %. Sementara saluran komunikasi lainnya yang juga hampir dimiliki oleh sebagian besar responden, yaitu email. Pemiliknya mencapai antara 75 % - 93 %. Lalu internet, juga termasuk saluran komunikasi yang banyak dimiliki responden, yakni oleh 52-60 % responden. Demikian pula dengan komputer, juga banyak yang sudah memilikinya sebagai saluran komunikasi, yakni antara 55-72 %. (lihat tabel, 2) Tempat-tempat yang biasa mereka gunakan untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi tadi, yaitu di rumah, di kantor dan di warnet. Tempat-tempa lainnya seperti sekolah, kampus, relatif jarang digunakan sebagai tempat untu menggunakan saluran komunikasi tadi.

Tabel 2
Responden Menurut Kepemilikan Media TIK Secara Pribadi
n 300

Jenis Media TIK	Jakarta				Pangkal Pinang				Jambi			
	Memiliki		Tidak Memiliki		Memiliki		Tidak Memiliki		Memiliki		Tidak Memiliki	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Telepon	51	51.0	49	49.0	44	44.0	56	56.0	77	77.0	23	23.0

Jenis Media TIK	Jakarta				Pangkal Pinang				Jambi			
	Memiliki		Tidak Memiliki		Memiliki		Tidak Memiliki		Memiliki		Tidak Memiliki	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Faximile	9	9.0	91	91.0	5	5.0	95	95.0	2	2.0	98	98.0
Komputer	72	72.0	28	28.0	69	69.0	31	31.0	55	55.0	45	45.0
Internet	52	52.0	48	48.0	38	38.0	62	62.0	60	60.0	40	40.0
e-Mail	75	75.0	25	25.0	85	85.0	15	15.0	93	93.0	7	7.0
Website	25	25.0	75	75.0	7	7.0	93	93.0	19	19.0	81	81.0
Handphone	93	93.0	7	7.0	98	98.0	2	2.0	97	97.0	3	3.0

Sumber : Hasil Olah Data 2012

B. Budaya Politik

Terkait dengan fenomena budaya politik dimaksud, maka menyangkut fenomena budaya politik sebagai obyek secara umum, para responden yang diminta menyikapi masalah “Banyak Terjadinya Aktifitas Elit Politik di Tingkat Infrastruktur yang Mencoba Mempengaruhi Kalangan Elit Politik di Tingkat Suprastruktur”, terlihat bagian terbesar mereka itu ternyata “setuju” mengenai perilaku elit tersebut. Gejala ini cenderung hampir sama di tiga lokasi penelitian. Di Jakarta proporsinya sebesar (49.0%); Di Pangkal Pinang (55.0%) dan di Jambi (55.0%). Namun demikian, terlihat cukup banyak juga responden yang kurang setuju terhadap persoalan tersebut. Fenomena ini kiranya dapat diartikan sebagai menggambarkan bahwa kalangan responden itu cenderung sudah mengerti praktik perilaku politik di lingkungannya.

Mengenai penilaian responden menyangkut “kecenderungan elit politik nasional maupun daerah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri”, kalangan responden di tiga lokasi sebagian besar tampaknya juga cenderung setuju mengenai sikap elit politik tadi. Sebagian kecil saja tampaknya responden yang tidak setuju mengenai sikap elit politik tadi. (lihat tabel 3).

Tabel 3
Responden Menurut Penilaiannya terhadap kecenderungan elit politik nasional/daerah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri
n 300

Penilaian Responden	Prov. DKI Jakarta		Prov. Bangka Belitung		Prov. Jambi	
	f	%	f	%	f	%
Sangat setuju	37	37.0	26	26.0	33	33.0
Setuju	46	46.0	52	52.0	44	44.0
Kurang setuju	4	4.0	8	8.0	14	14.0
Tidak setuju	8	8.0	3	3.0	3	3.0
Sangat tidak setuju	5	5.0	3	3.0	4	4.0
Tidak tahu			8	8.0	2	2.0
Total	100	100.0	100	100.0	100	100.0

Kemudian menyangkut ‘Obyek-obyek input’ dalam sistem politik, maka terkait dengan fenomena penilaian responden menyangkut persoalan “tidak diapresiasi realisasi pengajuan kebijakan dari bawah ke atas oleh pemerintah nasional maupun daerah”, responden pun di sini terlihat cenderung setuju mengenai gejala politik dimaksud. Sedikit saja di antara mereka itu yang terlihat tidak setuju. (lihat tabel 4).

Tabel 4
Responden Menurut Penilaiannya terhadap tidak diapresiasi realisasi pengajuan kebijakan dari bawah ke atas oleh pemerintah nasional maupun daerah

Penilaian Responden	Lokasi Penelitian							
	Prov. DKI Jakarta		Prov. Bangka Belitung		Prov. Bengkulu		Prov. Jambi	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat setuju	18	18.0	18	18.0	5	5.0	20	20.0
Setuju	60	60.0	54	54.0	55	55.0	50	50.0
Kurang setuju	10	10.0	15	15.0	21	21.0	24	24.0
Tidak setuju	8	8.0	3	3.0	6	6.0	4	4.0
Sangat tidak setuju	2	2.0			3	3.0	2	2.0
Tidak tahu	2	2.0	10	10.0	10	10.0		
Total	100	100.0	100	100.0	100	100.0	100	100.0

Selanjutnya, menyangkut fenomena “Obyek-obyek output”. Fenomena ini dalam penelitian ini dibatasi pada elit pelaku pengambil kebijakan sebagai wujud dari “Obyek-obyek output” dari sistem politik. Dalam hubungan ini maka responden diiminta penilaiannya mengenai “kesesuaian antara kapabilitas pemimpin yang menjabat saat ini dengan posisi jabatan yang diembannya”. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa kecenderungan yang terjadi yaitu responden bagian terbesarnya menilai tidak sesuai/kurang sesuai. Di Jakarta, responden yang menilai bahwa kapabilitas pemimpin yang kurang sesuai dengan posisi jabatan yang diembannya saat ini, persentasenya mencapai 55.0 % dan yang menilai tidak sesuai sebanyak 21.0 %. Sementara di Pangkal Pinang, respondennya mencapai 42 % dan di Jambi sebanyak 38 %. (lihat tabel 5).

Tabel 5
Responden Menurut Penilaiannya terhadap kesesuaian antara kapabilitas pemimpin yang menjabat saat ini dengan posisi jabatannya
 n 300

Penilaian Responden	Prov. DKI Jakarta		Pangkal Pinang		Prov. Jambi	
	f	%	f	%	f	%
Sangat sesuai	1	1.0	1	1.0		
Sesuai	14	14.0	16	16.0	11	11.0
Kurang sesuai	55	55.0	42	42.0	53	53.0
Tidak sesuai	21	21.0	22	22.0	31	31.0

Penilaian Responden	Prov. DKI Jakarta		Pangkal Pinang		Prov. Jambi	
	f	%	f	%	f	%
Sangat tidak sesuai	7	7.0	6	6.0	3	3.0
Tidak tahu	2	2.0	13	13.0	2	2.0
Total	100	100.0	100	100.0	100	100.0

Terakhir yaitu terkait dengan fenomena keterlibatan responden dalam proses pengambilan keputusan sebagai representasi dari aktifitas politik mereka yang nota bene mencerminkan budaya politik partisipan mereka sendiri. Dalam hubungan ini, temuan penelitian memperlihatkan bahwa ternyata mereka itu pada umumnya merasa tidak ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan-kebijakan pemda oleh pemerintah daerah. Responden yang menilai demikian, di Jakarta persentasinya mencapai 69.0; Pangkal Pinang 75.0 % dan di Jambi 58.0 % (lihat tabel 6).

Tabel 6
Responden Menurut Keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan-kebijakan pemda oleh pemerintah daerah n 300

Penilaian Responden	Prov. DKI Jakarta		Pangkal Pinang		Prov. Jambi	
	f	%	f	%	f	%
Tidak tahu	24	24.0	21	21.0	27	27.0
Ikut dilibatkan	7	7.0	4	4.0	15	15.0
Tidak ikut dilibatkan	69	69.0	75	75.0	58	58.0
Total	100	100.0	100	100.0	100	100.0

Secara *over all*, fenomena budaya politik di kalangan responden sebelumnya, berdasarkan indikator yang diterapkan dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa di tiga lokasi penelitian itu ternyata responden umumnya cenderung sudah memiliki budaya politik yang bersifat *partisipan*. Di Pangkal Pinang proporsinya sebanyak 88 %. Di Jakarta bahkan mencapai 99 % dan di Jambi mencapai 94 %. Dengan demikian, ada kecenderungan yang sama di lokasi penelitian, bahwa berdasarkan kehadiran media baru itu, melalui penggunaannya responden umumnya mengindikasikan sudah memiliki sikap-sikap budaya politik yang bercirikan tipologi *partisipan*.

C. Partisipasi Politik Melalui Media Baru

Fenomena partisipasi politik dalam penelitian ini dilihat dari aktifitas mereka berkomunikasi melalui internet (melalui saluran : Website; Forum Diskusi; Jejaring Sosial; Blog; E-mail dan *Chatting Room*), khususnya menyangkut pengarahan diri mereka untuk memuat konten-konten menyangkut permasalahan politik, ekonomil, sosial, budaya, militer dan agama.

Terkait aktifitas berkomunikasi menggunakan internet melalui saluran *Chatting Room*, temuan memeperlihatkan bahwa mereka itu umunya tidak pernah mengarahkan dirinya untuk membuat konten menyangkut kesemua masalah tadi. Tampak sebagian kecil saja responden yang cukup sering mengarahkan dirinya untuk membuat konten-konten demikian. Dari sebagian kecil responden tadi, maka konten-konten itu terkait dengan masalah agama, ekonomi, budaya,

dan social dengan proporsi responden pengakses antara 16 % - 30 %.

Fenomena yang sama juga tampak terjadi ketika mereka menggunakan internet itu berkomunikasi melalui saluran email. Mereka ini hampir pada umumnya tidak pernah membuat konten-konten terkait dengan masalah politik, ekonomil, sosial, budaya, militer dan agama. Hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang mengaku cukup sering dan sering memuat konten-konten permasalahan politik, ekonomil, sosial, budaya, militer dan agama itu, di mana proporsi responden pelakunya berkisar 1-30 %. Begitu pula melalui blog, responden yang tidak pernah dan hampir tidak pernah memuat konten-konten dimaksud tadi bahkan sangat dominan. Proporsinya mencapai > 75 %.

Penelitian ini juga menemukan bahwa aktivitas internet responden melalui *website* juga tidak jauh beda dengan aktivitas internet melalui saluran lain. Responden tidak pernah mendiskusikan masalah militer, politik dan ekonomi melalui *websites*. Selain ketiga hal itu yang memang tidak pernah dijadikan bagian dari aktivitas internet responden melalui media lain, permasalahan agama juga termasuk masalah yang tidak pernah dibicarakan di *websites* oleh responden. Prosentase aktivitas internet responden melalui *websites* terkait masalah politik, ekonomi dan sebagainya terkonsentrasi pada pilihan tidak pernah dan hampir tidak pernah.

Menyangkut aktifitas komunikasi mereka melalui internet dengan menggunakan saluran Situs Jejaring Sosial, temuan menunjukkan kalangan responden itu kebanyakan tidak pernah dan jarang memuat konten menyangkut politik, ekonomil, sosial, budaya, militer dan agama dalam aktifitas komunikasi menggunakan situs jejaring sosial. Namun demikian, diantara mereka itu ada juga yang memuat konten-konten tadi dalam aktifitasnya. Di Jakarta dijumpai sebanyak 23 -25 % responden yang memuat kontennya dengan topik-topik bidang ekonomi, social, dan budaya. Di Jambi, untuk topik-topik ekonomi, agama dan sosial, proporsinya bahkan lebih banyak yakni berkisar 23-33 %. Di Pangkal Pinang, responden yang mengaku cukup sering memuat konten-konten dimaksud proporsinya cenderung memang relatif kecil yaitu antara 2-16 % saja.

Terakhir yaitu saluran forum diskusi. Terkait dengan fenomena ini, maka temuan menunjukkan bahwa saluran ini malah semakin sedikit para responden yang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan konten-konten tadi. Sebagian kecil saja di anantara mereka itu yang menggunakan forum diskusi dimaksud untuk kepentingan mengenkoding konten-konten masalah politik, ekonomil, sosial, budaya, militer dan agama. Proporsinya antara 4-11 % di Jakarta. Sementara di Pangkal Pinang proporsinya antara 2-7 % dan di Jambi antara 1-7 %. (lihat tabel 7).

Tabel 7

Responden Menurut Tingkat Keseringan dalam Mengarahkan Aktifitas Internet Menyangkut Berbagai Permasalahan Melalui Forum Diskusi

Lokasi Penelitian	Ragam Isi Permasalahan	Tidak pernah		Hampir Tidak Pernah		Jarang		Cukup Sering		Sering		Sangat Sering		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Prov. DKI Jakarta	politik	68	68.0	13	13.0	9	9.0	4	4.0	2	2.0	4	4.0	100	100.0
	ekonomi	65	65.0	8	8.0	14	14.0	8	8.0	2	2.0	3	3.0	100	100.0
	social	59	59.0	7	7.0	22	22.0	6	6.0	3	3.0	3	3.0	100	100.0
	budaya	61	61.0	8	8.0	13	13.0	11	11.0	3	3.0	4	4.0	100	100.0
	militer	72	72.0	12	12.0	10	10.0	4	4.0	1	1.0	1	1.0	100	100.0
	agama	62	62.0	11	11.0	12	12.0	7	7.0	4	4.0	4	4.0	100	100.0

Lokasi Penelitian	Ragam Isi Permasalahan	Tidak pernah		Hampir Tidak Pernah		Jarang		Cukup Sering		Sering		Sangat Sering		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Pangkal Pinang	politik	83	83.0	2	2.0	12	12.0	2	2.0			1	1.0	100	100.0
	ekonomi	81	81.0	3	3.0	13	13.0	2	2.0			1	1.0	100	100.0
	social	75	75.0	4	4.0	13	13.0	5	5.0	2	2.0	1	1.0	100	100.0
	budaya	77	77.0	3	3.0	13	13.0	5	5.0	1	1.0	1	1.0	100	100.0
	militer	89	89.0	5	5.0	4	4.0			1	1.0	1	1.0	100	100.0
	agama	75	75.0	6	6.0	10	10.0	7	7.0	1	1.0	1	1.0	100	100.0
Prov. Bengkulu	politik	85	85.0	8	8.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	1	1.0	100	100.0
	ekonomi	85	85.0	3	3.0	3	3.0	3	3.0	6	6.0			100	100.0
	social	82	82.0	2	2.0			6	6.0	9	9.0	1	1.0	100	100.0
	budaya	83	83.0			5	5.0	7	7.0	5	5.0			100	100.0
	militer	99	99.0	1	1.0									100	100.0
	agama	88	88.0	7	7.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	100	100.0
Prov. Jambi	politik	69	69.0	12	12.0	13	13.0	2	2.0	4	4.0			100	100.0
	ekonomi	70	70.0	5	5.0	14	14.0	6	6.0	4	4.0	1	1.0	100	100.0
	social	70	70.0	5	5.0	10	10.0	10	10.0	5	5.0			100	100.0
	budaya	70	70.0	5	5.0	17	17.0	4	4.0	3	3.0	1	1.0	100	100.0
	militer	76	76.0	11	11.0	8	8.0	3	3.0	2	2.0			100	100.0
	agama	69	69.0	6	6.0	12	12.0	6	6.0	5	5.0	2	2.0	100	100.0

Deskripsi sebelumnya kiranya itu menyangkut fenomena partisipasi politik responden melalui penggunaan media baru (*new media*). Fenomena dimaksud, secara *over all* memperlihatkan bahwa di lokasi itu cenderung adanya perbedaan tipologi terkait dengan gejala partisipasi dimaksud. Perbedaan itu terutama menyangkut responden yang bertipologi *apatis*. Responden yang demikian secara teoritis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Proporsi resoponden yang demikian berbeda jumlahnya di setiap lokasi, namun jadi bagian responden yang menonjol. Paling banyak dijumpai responden yang bertipologi *apatis* tersebut yaitu di Pangkal Pinang (79 %). Kemudian di Jambim jumlahnya sebanyak 57 %. Sementara di Jakarta, meski bukan menjadi yang dominan, namun jumlahnya mencapai 46 %. Sedang tipologi politik lain yang cenderung sama gejalanya di tiga lokasi penelitian, yaitu tipologi Spektator. Responden bertipologi ini menjadi kelompok responden terbesar kedua di setiap lokasi penelitian. Di Pangkal Pinang jumlahnya mencapai 15 %, di Jambi 38 % dan di Jakarta 49 %.

Mengenai tipe gladiator, yaitu responden yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, ditemukan juga dalam penelitian ini. Namun demikian jumlahnya tidak banyak, jumlahnya antara 3-5 % saja di ketiga lokasi penelitian. Begitu juga dengan tipologi pengkritik, jumlah rsspondennya relatif kecil. Bahkan, di Jambi tidak ditemukan responden yang bertipologi demikian. Namun di Jakarta dan

Pangkal Pinang masih ditemukan walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Seperti di Jakarta, jumlahnya hanya sebanyak dua (2) responden dan di Pangkal Pinang hanya satu (1) responden yang teridentifikasi bertipologi demikian. Sementara di Jambi, diketahui tidak satu respondenpun yang bertipologi peng-kritik itu.

D. Signifikansi Hubungan Antara Budaya Politik Masyarakat Pemilih Dengan Tipologi Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih

Bagian ini mencoba memaparkan hasil elaborasi antara variabel budaya politik dengan variabel partisipasi politik. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8
Hubungan Antara Tipologi Budaya Politik Dengan Tipologi Partisipasi Politik
n: 300

Lokasi Penelitian	Tipologi Budaya Politik	Tipologi Partisipasi Politik								Total
		Apatis (0 - 45)		Spektator (46 - 90)		Gladiator (91 - 135)		Pengkritik (136 - 180)		
		Fo	Ft	Fo	Ft	Fo	Ft	Fo	Ft	
Prov. DKI Jakarta	Subyek (2.67 - 5.32)	1	0.46	0	0.49	0	0.03	0	0.02	1
	Partisipan (5.33 - 8.00)	45	45.54	49	48.51	3	2.97	2	1.98	99
	Total	46		49		3		2		100
Pangkal Pinang	Parokial (0 - 2.66)	6	4.74	0	0.9	0	0.3	0	0.06	6
	Subyek (2.67 - 5.32)	3	4.74	2	0.9	1	0.3	0	0.06	6
	Partisipan (5.33 - 8.00)	70	69.52	13	13.2	4	4.4	1	0.88	88
	Total	79		15		5		1		100
Prov. Jambi	Parokial (0 - 2.66)	1	0.57	0	0.38	0	0.05	-	-	1
	Subyek (2.67 - 5.32)	4	2.85	1	1.9	0	0.25	-	-	5
	Partisipan (5.33 - 8.00)	52	53.58	37	35.72	5	4.7	-	-	94
	Total	57		38		5		-		100

Mengacu pada data tabel 8 di atas, maka dengan menghitung signifikansi hubungannya secara statistik yang mengadopsi pada rumus chi square (X^2), hasilnya memperlihatkan bahwa :

1) Hasil perhitungan X^2 dari tabel di atas untuk daerah DKI Jakarta sebesar 1,1857. Dengan melihat tabel distribusi X^2 , maka terlihat di situ bahwa untuk p (probabilitas) 0,05 pada df 3 adalah sebesar 7,815. Dengan demikian nilai ini lebih besar daripada nilai X^2 pada tabel di atas. Ini berarti asumsi yang menduga adanya hubungan antara tipologi budaya politik Masyarakat Pemilih dengan tipologi partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktifitas pemanfaatan media baru, dapat ditolak. Dengan kata lain, asumsi bahwa kedua variabel saling berhubungan, ternyata tidak signifikan secara statistik;

2) Hasil perhitungan X^2 dari tabel di atas untuk daerah Pangkal Pinang sebesar 5,330. Dengan melihat tabel distribusi X^2 , maka terlihat di situ bahwa untuk p (probabilitas) 0,05 pada df 6 adalah sebesar 12,592. Dengan demikian nilai ini lebih besar daripada nilai X^2 pada tabel di atas. Ini berarti asumsi yang menyebutkan adanya hubungan antara tipologi budaya politik

Masyarakat Pemilih dengan tipologi partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktifitas pemanfaatan media baru, dapat ditolak secara statistik.

3) Hasil perhitungan X^2 dari tabel di atas untuk daerah Jambi sebesar 2,0063. Dengan melihat tabel distribusi X^2 , maka terlihat di situ untuk p (probabilitas) 0,05 pada df 4 adalah sebesar 9,488. Dengan demikian nilai ini lebih besar daripada nilai X^2 pada tabel di atas. Ini berarti asumsi yang menduga adanya hubungan antara tipologi budaya politik Masyarakat Pemilih dengan tipologi partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktifitas pemanfaatan media baru, secara statistik dapat ditolak.

E. Diskusi

Penelitian ini berupaya menjawab persoalan menyangkut fenomena budaya politik dan partisipasi politik terkait penggunaan media baru oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para anggota masyarakat yang secara sampling terpilih dari populasi pemilih menurut data KPUD.

Dengan mengacu pada pendapat Almond mengenai tipe budaya politik, penelitian ini menemukan bahwa variasi budaya politik itu memang terdapat dalam masyarakat pemilih namun dengan satu kecenderungan di mana responden cenderung sudah memiliki budaya politik bersifat *partisipan*. Ini ditandai oleh data yang menunjukkan bahwa memang terdapat keragaman budaya politik di tiga lokasi penelitian namun dengan satu kecenderungan di mana responden umumnya secara *over all* sudah memiliki budaya politik bersifat *partisipan*.

Menyangkut fenomena partisipasi politik yang secara teoritis mengacu pada pendapat Suhemi yang nobene mengacu pada pendapat Budiardjo (2003), Huntington, Nelson (2001), dan Milbrarth dan Goel (1997), penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena partisipasi politik itu memang bervariasi adanya. Secara *over all*, terkait fenomena ini, responden penelitian yang nota bene terdiri dari kalangan pemilih tetap versi KPUD itu, memang teridentifikasi tipologinya bervariasi: (a) apatis (b) spektator dan (c) gladiator dan (d) pengritik. Dalam penelitian ini variasi tipologi itu ditemukan tidak memang tidak sama komposisinya. Secara *over all* memperlihatkan bahwa di lokasi itu cenderung adanya perbedaan tipologi terkait dengan gejala partisipasi dimaksud. Perbedaan itu terutama menyangkut responden yang bertipologi *apatis*. Proporsi responden yang demikian berbeda jumlahnya di setiap lokasi, namun jadi bagian responden yang menonjol. Paling banyak dijumpai di Pangkal Pinang (79 %). Kemudian di Jambi jumlahnya sebanyak 57 %. Sementara di Jakarta, meski bukan menjadi yang dominan, namun jumlahnya mencapai 46 %. Sedang tipologi politik lain yang cenderung sama gejalanya di tiga lokasi penelitian, yaitu tipologi Spektator. Responden bertipologi ini menjadi kelompok responden terbesar kedua di setiap lokasi penelitian. Di Pangkal Pinang jumlahnya mencapai 15 %, di Jambi 38 % dan di Jakarta 49 %.

Dari hasil elaborasi menyangkut hubungan kedua variabel yang diasumsikan memiliki hubungan itu, ternyata secara statistik hubungan itu tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan di ketiga lokasi penelitian. Di Jakarta, hubungan itu dapat dinotasikan dengan : $X^2 = 1,1857$, df 3, $p > \alpha$ 0,05 (7,815). Di Pangkal Pinang, hubungan itu bernotasi : $X^2 = 5,330$, df 6, $p > \alpha$ 0,05 (12,592). Sementara di Jambi bernotasi : $X^2 = 2,0063$, df 4, $p > \alpha$ 0,05 (9,488).

Tidak signifikannya hubungan itu mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor itu berupa variabel *extraneous variabel* seperti *interest*, kosmopolitanisme, atau menyangkut masalah *proximity*. Guna melihat fenomena ini lebih jauh, kiranya bagi pelaksanaan penelitian sejenis di masa mendatang, pelibatan variabel-variabel sejenis untuk kepentingan pengujian kiranya perlu dimasukkan.

PENUTUP

Penelitian ini berupaya menjawab persoalan menyangkut fenomena budaya politik dan partisipasi politik terkait penggunaan media baru oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para anggota masyarakat yang secara sampling terpilih dari populasi pemilih menurut data KPUD.

Dengan mengacu pada pendapat Almond mengenai tipe budaya politik, penelitian ini menemukan bahwa variasi budaya politik itu memang terdapat dalam masyarakat pemilih namun dengan satu kecenderungan di mana responden cenderung sudah memiliki budaya politik bersifat *partisipan*. Ini ditandai oleh data yang menunjukkan bahwa memang terdapat keragaman budaya politik di tiga lokasi penelitian namun dengan satu kecenderungan di mana responden umumnya secara *over all* sudah memiliki budaya politik bersifat *partisipan*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena partisipasi politik itu memang bervariasi adanya. Secara *over all*, terkait fenomena ini, responden penelitian yang nota bene terdiri dari kalangan pemilih tetap versi KPUD itu, memang teridentifikasi tipologinya bervariasi. Secara *over all* memperlihatkan bahwa di lokasi itu cenderung adanya perbedaan tipologi. Perbedaan itu terutama menyangkut responden yang bertipologi *apatitis*. Proporsi responden yang demikian berbeda jumlahnya di setiap lokasi, namun jadi bagian responden yang menonjol. Paling banyak dijumpai di Pangkal Pinang (79 %). Kemudian di Jambi jumlahnya sebanyak 57 %. Sementara di Jakarta, meski bukan menjadi yang dominan, namun jumlahnya mencapai 46 %. Sedang tipologi politik lain yang cenderung sama gejalanya di tiga lokasi penelitian, yaitu tipologi Spektator. Responden bertipologi ini menjadi kelompok responden terbesar kedua di setiap lokasi penelitian.

Dari hasil elaborasi menyangkut hubungan kedua variabel yang diasumsikan memiliki hubungan itu, ternyata secara statistik hubungan itu tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan di ketiga lokasi penelitian.

Daftar Pustaka

- Ayed, Hasan A. (2005). The Influence of Internet in Political Culture (A Field Study). *Journal of Social Sciences* pp 128-135.
- Flew, Terry. (2004). *An Introduction to New Media 2nd Edition*. pp 3.
- Kaye, Barbara K., Johnson, Thomas J. (2002). Online and in the Know : Uses and Gratifications of the Web for Political Information. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*. pp 54-71.
- Mossberger, Karen. (2008). *Digital Citizenship, The Benefits of Society Online : Political Participation*. pp 67.
- Quintelier, Ellen., Vissers, Sara. (2008). *The Effect of Internet use on Political Participation*. Sage Publications.